

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
DI SMP NEGERI 1 MUARO JAMBI**

Andrio Oktavani¹, Edi Saputra²

^{1 2}PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

andriooktavani@gmail.com, edisaputra@uinjambi.ac.id,

ABSTRACT

The Merdeka Curriculum is an educational policy that emphasizes learning flexibility and the strengthening of students' competencies and character. Its implementation requires teachers to adapt learning planning, instruction, and assessment practices. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Curriculum in Islamic Religious Education and Character Education at SMP Negeri 1 Muaro Jambi, identify challenges faced by teachers, and examine efforts to address these challenges. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that SMP Negeri 1 Muaro Jambi began implementing the Merdeka Curriculum in 2023 under the "independent change" category. Teachers encountered several challenges, including difficulties in preparing teaching modules, managing classrooms due to student heterogeneity, differences in students' interests and talents that complicate differentiated learning, and determining appropriate assessment methods for project-based learning. Limited competence in utilizing information and communication technology also remains a significant obstacle. To overcome these challenges, teachers have participated in curriculum training programs, engaged in peer discussions and sharing best practices, developed adaptive learning tools, and continuously improved their technological competencies. These efforts play an important role in supporting the effective implementation of the Merdeka Curriculum.

Keywords: Merdeka Curriculum; Islamic Religious Education and Character Education; Learning Challenges

ABSTRAK

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang menekankan fleksibilitas pembelajaran serta penguatan kompetensi dan karakter peserta didik. Implementasi kurikulum ini menuntut kesiapan guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Muaro Jambi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan

teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Muaro Jambi mulai menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2023 dengan kategori “mandiri berubah”. Kendala yang dihadapi guru meliputi kesulitan dalam penyusunan modul ajar, pengelolaan kelas akibat heterogenitas kemampuan peserta didik, perbedaan minat dan bakat siswa yang menyulitkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, serta penentuan teknik penilaian yang sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi hambatan. Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengikuti pelatihan kurikulum, berdiskusi dan berbagi praktik baik dengan sesama guru, mengembangkan perangkat pembelajaran yang adaptif, serta meningkatkan kompetensi teknologi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka; Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti; Problematika Pembelajaran

A. Pendahuluan

Pendidikan nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik dalam aspek spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak, maupun keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku melalui pengalaman

belajar yang berlangsung sepanjang hayat.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, kurikulum memiliki peran strategis sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat, serta kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum menjadi keniscayaan dalam sistem pendidikan nasional guna menjawab tantangan global dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kebijakan Merdeka

Belajar yang salah satu produknya adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini resmi diberlakukan pada Februari 2022 dan dirancang sebagai kurikulum yang fleksibel, berfokus pada materi esensial, serta menekankan penguatan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik peserta didik.

Kurikulum Merdeka juga menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran, dengan mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Salah satu ciri khas kurikulum ini adalah penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai kegiatan kokurikuler yang bertujuan menguatkan karakter dan kompetensi abad ke-21 melalui pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan lintas mata pelajaran. Namun, implementasi kebijakan ini dalam praktik pembelajaran tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran.

Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, penerapan Kurikulum Merdeka memiliki posisi strategis sekaligus kompleks. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter, akhlak, dan nilai-nilai spiritual peserta didik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang memadai agar mampu mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai problematika. Berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 1 Muaro Jambi, ditemukan sejumlah kendala dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, antara lain keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka, kesulitan dalam menyusun modul ajar dan asesmen, kurang optimalnya penerapan metode

dan media pembelajaran yang inovatif, serta rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal Kurikulum Merdeka dan praktik pembelajaran di sekolah.

Adapun teori/konsep yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. Pertama, Problematika Pendidikan, Secara etimologis, istilah problematika berasal dari kata problem yang merujuk pada suatu persoalan atau keadaan yang belum terselesaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problematika diartikan sebagai hal yang masih menimbulkan masalah atau permasalahan yang dihadapi dan belum dapat dipecahkan secara tuntas (KBBI, 2021). Pengertian ini menegaskan bahwa problematika tidak hanya sekadar masalah biasa, melainkan persoalan yang membutuhkan perhatian serius dan upaya penyelesaian yang sistematis.

Problematika juga dapat dipahami sebagai kumpulan permasalahan atau isu yang muncul dalam konteks tertentu dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan. Hesti, Aslan, dan rekan-rekannya (2020) menjelaskan bahwa problematika mencakup berbagai hambatan yang memerlukan analisis mendalam guna menemukan solusi yang tepat. Dalam konteks ini, problematika sering kali bersifat kompleks, saling berkaitan, serta tidak dapat diselesaikan secara instan.

Lebih lanjut, Suprima et al. (2021) menyatakan bahwa analisis terhadap problematika menjadi langkah penting untuk memahami karakteristik permasalahan, mengidentifikasi faktor penyebab, serta merumuskan strategi pemecahan masalah yang relevan. Oleh karena itu, problematika tidak hanya dipandang sebagai kendala, tetapi juga sebagai objek kajian yang dapat mendorong perbaikan dan pengembangan dalam suatu sistem, termasuk sistem pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, problematika merujuk pada berbagai tantangan dan persoalan yang memengaruhi proses pembelajaran, pelaksanaan kurikulum, serta pencapaian tujuan pendidikan. Problematika pendidikan dapat muncul dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal lembaga pendidikan, yang pada akhirnya

berdampak pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.

Beberapa bentuk problematika dalam pendidikan antara lain:

a. Kualitas Pendidikan. Adanya kualitas pendidikan yang belum merata, rendahnya standar akademik, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya fasilitas pendukung pembelajaran menjadi permasalahan utama yang masih dihadapi dunia pendidikan (Fadila & Hartini, 2015).

b. Kurikulum. Problematika kurikulum maksudnya yaitu kurikulum yang berkaitan dengan kesesuaian kurikulum terhadap kebutuhan zaman, efektivitas pendekatan pembelajaran, serta kemampuan kurikulum dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dunia nyata. Perubahan kebijakan kurikulum juga sering menimbulkan kesulitan adaptasi bagi pendidik (Kemendikbudristek, 2022).

c. Teknologi dalam Pendidikan, artinya Integrasi teknologi ke dalam pembelajaran menghadirkan tantangan tersendiri, seperti keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital guru, serta

keberlanjutan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran (Sutarto et al., 2020).

d. Ketimpangan Pendidikan dan Ketidakmerataan akses pendidikan antar wilayah dan latar belakang sosial ekonomi menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan dan hasil belajar peserta didik.

e. Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran menjadi problematika dalam evaluasi pembelajaran yang mencakup kesulitan dalam melakukan penilaian yang objektif, beragamnya standar asesmen, serta kecenderungan penilaian yang hanya berfokus pada aspek kognitif dan kuantitatif tanpa mempertimbangkan aspek afektif dan psikomotorik.

f. Pendidikan Inklusif menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus maupun latar belakang yang beragam masih menjadi persoalan serius dalam sistem pendidikan (Ramli et al., 2023).

Dari beberapa poin di atas mengungkapkan bahwa tidak semua problematika dapat diselesaikan

melalui pendekatan ilmiah. Ismayani (2020) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pendekatan non-ilmiah yang sering digunakan dalam pemecahan masalah, antara lain pendekatan dogmatis yang didasarkan pada keyakinan tertentu, pendekatan intuitif yang bersumber dari pengalaman dan perasaan, pendekatan spekulatif melalui metode coba-coba, serta pendekatan otoritas ilmiah yang merujuk pada pandangan para ahli.

Namun demikian, dalam konteks penelitian pendidikan, problematika idealnya dianalisis melalui pendekatan ilmiah agar solusi yang dihasilkan bersifat sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pendekatan ilmiah memungkinkan peneliti mengkaji problematika pendidikan secara mendalam berdasarkan data empiris, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik pendidikan, termasuk dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

Kedua, teori/konsep Kurikulum Merdeka. Kurikulum merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan

pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

Secara konseptual, kurikulum juga dipahami sebagai perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang dirancang oleh lembaga pendidikan untuk diberikan kepada peserta didik dalam suatu jenjang pendidikan tertentu (Wijatun & Indrajit, 2022). Kurikulum berfungsi sebagai arah, isi, dan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan tujuan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik.

Kurikulum Merdeka merupakan bentuk pengembangan kurikulum yang menekankan pembelajaran intrakurikuler yang fleksibel, beragam, dan berfokus pada penguatan kompetensi esensial peserta didik. Kurikulum ini dirancang agar peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep, mengembangkan kompetensi, serta membangun

karakter. Dalam Kurikulum Merdeka, pendidik diberikan keleluasaan dalam memilih dan mengembangkan perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik peserta didik (Khoirurrijal et al., 2022).

a. Karakteristik Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun ajaran 2022/2023 dengan memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikannya sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah. Karakteristik utama Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendukung pemulihan pembelajaran serta meningkatkan kualitas proses pendidikan (Indhartono, 2022).

Salah satu karakteristik utama Kurikulum Merdeka adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Profil Pelajar Pancasila merupakan perwujudan tujuan pendidikan nasional yang menjadi acuan utama dalam pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Profil ini terdiri dari enam dimensi utama, yaitu

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif (Kemdikbudristek, 2022).

Keenam dimensi Profil Pelajar Pancasila dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan tahap perkembangan psikologis dan kognitif peserta didik. Implementasi dimensi tersebut dilakukan tidak hanya melalui pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik.

Karakteristik berikutnya adalah fokus pada materi esensial. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengurangi kepadatan materi agar pendidik memiliki ruang yang lebih luas dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna. Fokus pada materi esensial memungkinkan penguatan kompetensi literasi dan numerasi, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui pembelajaran yang mendalam (Indhartono, 2022).

Selain itu, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik serta konteks satuan pendidikan. Fleksibilitas ini mencakup pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran yang adaptif terhadap perbedaan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan berpusat pada siswa.

b. Struktur Kurikulum Merdeka

Dalam struktur Kurikulum Merdeka, istilah kelas digantikan dengan istilah fase. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), pembelajaran berada pada Fase D yang mencakup kelas VII, VIII, dan IX (Kemdikbudristek, 2022). Struktur Kurikulum Merdeka pada jenjang SMP/MTs terdiri atas dua komponen utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Pembelajaran intrakurikuler berfokus pada pencapaian kompetensi mata pelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, P5 dialokasikan sekitar 20–25% dari total

jam pelajaran per tahun sebagai bentuk pembelajaran kokurikuler yang dirancang untuk menguatkan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila (Kemdikbudristek, 2022).

P5 merupakan pembelajaran berbasis proyek lintas mata pelajaran yang bersifat fleksibel, baik dari segi muatan, waktu, maupun metode pelaksanaannya. Kegiatan ini tidak terikat secara ketat pada struktur mata pelajaran tertentu, melainkan dirancang untuk mengembangkan kompetensi umum seperti kolaborasi, pemecahan masalah, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial (Suprayitno, 2020).

Proyek yang dikembangkan dalam P5 bersifat kontekstual dan relevan dengan kondisi lingkungan serta budaya lokal. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan dapat merancang proyek yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tema-tema utama dalam P5 meliputi gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan (Kemdikbudristek, 2022).

Ketiga, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berfungsi untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003).

Secara konseptual, Pendidikan Agama Islam dipahami sebagai proses bimbingan yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh pendidik untuk mengembangkan aspek jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh sesuai dengan ajaran Islam. Dalam tradisi pendidikan Islam, istilah tarbiyah digunakan untuk menggambarkan proses pendidikan yang menekankan pembinaan secara

menyeluruh terhadap potensi manusia. Pembelajaran PAI harus mencakup tiga ranah utama, yaitu kognitif (akal), afektif (hati), dan psikomotorik (akhlak), yang dilaksanakan secara simultan, interaktif, dan holistik (Syadzily, 2020).

Armai Arief memaknai pendidikan Islam sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, pembelajaran PAI tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran religius peserta didik (Hamim et al., 2022).

a. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan utama Pendidikan Agama Islam adalah membentuk peserta didik agar memiliki keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi peserta didik secara utuh, baik dari aspek spiritual,

intelektual, maupun sosial (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003).

Tujuan pendidikan dapat dipahami sebagai arah dan standar usaha yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran serta menjadi indikator keberhasilan pendidikan itu sendiri (Muhammad, 2021). Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah, tujuan tersebut diarahkan pada beberapa aspek, antara lain menumbuhkan sikap religius dan disiplin peserta didik, menanamkan kecintaan terhadap ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk karakter takwa melalui ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Selain itu, Pendidikan Agama Islam bertujuan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, serta membimbing peserta didik agar mampu memahami ajaran Islam secara benar dan mengamalkannya dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, PAI tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran normatif, tetapi juga sebagai sarana

pembentukan keterampilan beragama yang aplikatif dalam kehidupan sosial (Hidayah, 2022).

b. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mencakup beberapa aspek utama yang saling berkaitan. Aspek Al-Qur'an menekankan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an, memahami makna kandungannya, serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Aspek akidah berfokus pada penguatan keimanan melalui pemahaman rukun iman dan penghayatan nilai-nilai ketuhanan, termasuk Asmaul Husna.

Aspek akhlak diarahkan pada pembentukan kepribadian peserta didik agar terbiasa berperilaku terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Sementara itu, aspek fiqih atau ibadah bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan ibadah serta memahami hukum-hukum Islam untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aspek sejarah kebudayaan Islam berfungsi mengenalkan perkembangan Islam serta meneladani nilai-nilai dan

keteladanan tokoh-tokoh Islam dalam sejarah (Latif, 2021).

Secara umum, ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam meliputi lima unsur pokok, yaitu Al-Qur'an, akidah, syariah (fiqih), akhlak, dan tarikh (sejarah). Kelima unsur tersebut merupakan garis besar isi pembelajaran PAI yang dirancang untuk membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia secara seimbang (Depdiknas, 2003).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam problematika penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Muaro Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai proses implementasi, tantangan yang dihadapi guru, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika tersebut, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di era Kurikulum Merdeka.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan pertama melakukan pengumpulan data, setelah melakukan pengumpulan data berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka maka dilanjut dengan mereduksi data. Kemudian data disajikan dan melakukan penarikan kesimpulan dan dideskripsikan mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Muaro Jambi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Kurikulum

Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Muaro Jambi mulai menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2023, termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Implementasi kurikulum ini dilaksanakan secara bertahap dan secara umum telah berjalan cukup baik,

meskipun masih dijumpai sejumlah kendala pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

Pada tahap persiapan, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Salah satu bentuk kesiapan tersebut adalah keikutsertaan guru dalam pelatihan dan bimbingan yang diselenggarakan oleh sekolah, dinas pendidikan, maupun lembaga terkait. Pelatihan ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman guru terhadap konsep Kurikulum Merdeka serta keterampilan dalam mengimplementasikannya di kelas. Temuan ini sejalan dengan pandangan Simanjuntak (2005) yang menyatakan bahwa pelatihan merupakan sarana strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja.

Selain mengikuti pelatihan, guru juga menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan ketentuan Kurikulum Merdeka, meliputi capaian pembelajaran (CP), tujuan pembelajaran (TP), alur tujuan pembelajaran (ATP), serta modul ajar.

Perubahan istilah dari kurikulum sebelumnya, seperti KI dan KD menjadi CP serta RPP menjadi modul ajar, menuntut pemahaman baru dari guru agar perangkat pembelajaran dapat disusun secara tepat dan aplikatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam aspek perencanaan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menerapkan tahapan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal, guru mengondisikan kelas, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran, serta mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan fokus siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan ini sejalan dengan pendapat Sukirman (2012) yang menekankan pentingnya kegiatan pembukaan sebagai penentu kualitas proses pembelajaran selanjutnya.

Pada kegiatan inti, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, inkuiri, dan pemanfaatan media pembelajaran yang relevan dengan materi. Penerapan

pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan melibatkan siswa dalam diskusi kelompok untuk menemukan permasalahan dan solusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sebagaimana prinsip utama Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik.

Sementara itu, pada kegiatan akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, penyampaian kesimpulan oleh siswa, serta penguatan materi dan pesan moral dari guru. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai dasar perbaikan pembelajaran selanjutnya, sebagaimana dikemukakan oleh Djamarah (2005) bahwa evaluasi merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran.

Dalam aspek penilaian, Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menggunakan berbagai bentuk asesmen, seperti portofolio, penugasan, praktik, proyek,

produk, tes tertulis, dan tes lisan. Penilaian disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, sehingga hasil belajar tidak harus seragam namun tetap mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian dalam Kurikulum Merdeka menekankan prinsip keadilan, keberagaman, dan kebermaknaan proses belajar siswa.

Secara keseluruhan, penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Muaro Jambi telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar kurikulum, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kesiapan guru, inovasi pembelajaran, dan pengelolaan asesmen agar implementasinya dapat berjalan lebih optimal.

2. Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Muaro Jambi masih menghadapi berbagai problematika yang muncul pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Problematika ini menunjukkan adanya tantangan adaptasi guru terhadap perubahan paradigma pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum Merdeka.

a. Problematika Guru dalam Perencanaan Pembelajaran

Pada tahap perencanaan, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mengalami kendala dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik Kurikulum Merdeka. Meskipun penyusunan perangkat pembelajaran telah dilakukan secara terkoordinasi bersama guru lain, guru masih mengalami kesulitan dalam menganalisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, serta mengembangkan modul ajar. Perubahan struktur perencanaan dari kurikulum sebelumnya menuntut pemahaman konseptual dan teknis yang lebih mendalam, sehingga proses perencanaan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Selain itu, guru juga mengalami kesulitan dalam menentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan,

terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penentuan strategi pembelajaran menuntut guru untuk memahami karakteristik siswa dan kondisi kelas secara menyeluruh, yang dalam praktiknya masih menjadi tantangan tersendiri.

Problematika lain yang cukup dominan adalah keterbatasan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Ketidapahaman guru terhadap pemanfaatan teknologi berbasis komputer serta rendahnya keterampilan TIK berdampak pada penyusunan perangkat pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran digital. Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat Kurikulum Merdeka mendorong integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.

Di samping itu, perubahan komposisi pembelajaran yang memadukan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila juga menuntut guru untuk merancang perencanaan kegiatan kokurikuler secara kontekstual. Guru dihadapkan pada tantangan untuk menyusun perencanaan proyek yang tidak membebani peserta didik secara mental maupun material, namun tetap mampu

mencapai tujuan pembelajaran dan penguatan karakter.

b. Problematika Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menghadapi tantangan yang berkaitan dengan heterogenitas peserta didik. Perbedaan bakat, minat, kemampuan akademik, dan latar belakang siswa menyulitkan guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan individual setiap peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik masih memerlukan penyesuaian dan penguatan strategi pembelajaran.

Kendala lain yang dihadapi adalah adanya materi pembelajaran yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, sementara kemampuan membaca Al-Qur'an siswa masih beragam. Kondisi ini menghambat kelancaran proses pembelajaran, khususnya bagi siswa yang belum memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik. Selain itu, perubahan konten dalam buku paket Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk melakukan analisis terlebih dahulu agar materi yang disampaikan

tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Guru juga menghadapi keterbatasan sumber belajar yang relevan dengan Kurikulum Merdeka, sehingga materi ajar yang luas tidak selalu didukung oleh referensi yang memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran semakin menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan media dan bahan yang tersedia. Di sisi lain, keterbatasan waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, terutama dalam kegiatan kokurikuler yang membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih kompleks.

c. Problematika Guru dalam Penilaian Pembelajaran

Pada aspek penilaian, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tidak mengalami kesulitan yang signifikan dalam melaksanakan asesmen formatif dan sumatif, karena praktik penilaian tersebut telah diterapkan pada kurikulum sebelumnya. Namun demikian, guru masih mengalami kendala dalam menentukan bentuk asesmen yang paling sesuai dengan materi pembelajaran dan karakteristik Kurikulum Merdeka.

Kesulitan utama terletak pada penentuan asesmen dalam pembelajaran berbasis proyek. Banyaknya jenis dan bentuk asesmen, serta perbedaan minat belajar, daya tangkap, dan kedisiplinan siswa, menuntut guru untuk lebih selektif dalam memilih instrumen penilaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas asesmen dalam Kurikulum Merdeka sekaligus menjadi tantangan bagi guru dalam mewujudkan penilaian yang adil, objektif, dan bermakna bagi seluruh peserta didik.

3. Solusi Guru dalam Menghadapi Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Upaya penyelesaian terhadap berbagai problematika penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 1 Muaro Jambi dilakukan secara bertahap dan kolaboratif, baik oleh guru maupun pihak sekolah. Solusi tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan adanya pandangan keberhasilan implementasi kurikulum ditentukan dengan oleh kesiapan

pendidik dan dukungan kelembagaan sekolah.

a. Solusi dalam Perencanaan Pembelajaran

Guru PAI dan Budi Pekerti mengatasi kendala perencanaan pembelajaran dengan melakukan sharing dan diskusi antar guru, baik secara formal melalui forum MGMP sekolah maupun secara informal. Kegiatan ini bertujuan untuk saling bertukar pengalaman terkait kesulitan dalam menganalisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, serta mengembangkan modul ajar berbasis Kurikulum Merdeka.

Selain itu, guru didorong untuk keluar dari zona nyaman dengan meningkatkan literasi teknologi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, belajar mandiri, serta pencarian referensi perencanaan pembelajaran dan pembelajaran berbasis proyek dari berbagai sumber yang relevan. Langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran guru terhadap tuntutan profesionalisme pendidik dalam menghadapi perubahan kebijakan kurikulum.

b. Solusi dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran, kreativitas dan kesiapan guru menjadi faktor utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Guru berupaya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan siswa, sehingga kebutuhan belajar individual dapat terpenuhi secara optimal.

Untuk mengatasi kendala kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur'an, guru PAI melaksanakan program tambahan berupa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Program ini difokuskan pada pembinaan siswa yang belum mampu membaca Al-Qur'an melalui bimbingan membaca Iqra' hingga mampu membaca Al-Qur'an secara mandiri. Program tersebut tidak hanya bersifat remedial, tetapi juga bersifat motivasional dengan pemberian apresiasi kepada siswa yang mengalami kemajuan.

Terkait keterbatasan sarana dan prasarana, guru memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah serta alat dan bahan sederhana sebagai media pembelajaran alternatif. Kreatifitas

guru dalam memanfaatkan sumber belajar yang tersedia menjadi salah satu indikator profesionalisme pendidik dalam kondisi keterbatasan fasilitas. Sementara itu, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek diatasi dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas proyek secara mandiri di luar jam sekolah, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi siswa.

Peran sekolah juga tampak signifikan dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka, antara lain melalui keikutsertaan kepala sekolah dan guru dalam pelatihan Kurikulum Merdeka, perencanaan program sekolah yang terarah, perubahan mindset guru, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan pembelajaran agar selaras dengan tujuan dan standar Kurikulum Merdeka.

c. Solusi dalam Penilaian Pembelajaran

Dalam aspek penilaian, guru PAI dan Budi Pekerti berupaya meningkatkan pemahaman terhadap konsep asesmen formatif dan sumatif yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Guru secara aktif mencari referensi terkait berbagai bentuk

asesmen, khususnya asesmen pembelajaran berbasis proyek, serta mengikuti pelatihan implementasi asesmen Kurikulum Merdeka.

Selain itu, sekolah melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan asesmen guna memastikan bahwa penilaian yang dilakukan guru sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Pelatihan yang diikuti secara rutin oleh guru menjadi sarana penguatan kompetensi pedagogik, terutama dalam menentukan bentuk asesmen yang adil, autentik, dan relevan dengan kebutuhan belajar siswa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Muaro Jambi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum ini telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dengan skema mandiri berubah. Secara umum, penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi berbagai kendala pada aspek perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

Pada aspek perencanaan pembelajaran, guru PAI dan Budi Pekerti telah berupaya menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan ketentuan Kurikulum Merdeka, meliputi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta modul ajar. Meskipun demikian, guru masih mengalami kesulitan dalam menganalisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan dan alur pembelajaran yang tepat, menentukan strategi dan metode pembelajaran, serta keterbatasan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, perencanaan pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan kokurikuler juga menjadi tantangan karena memerlukan kesiapan dan pengelolaan waktu yang matang.

Pada aspek pelaksanaan pembelajaran, problematika yang dihadapi guru meliputi heterogenitas kemampuan peserta didik, perbedaan bakat dan minat, keterbatasan kemampuan membaca Al-Qur'an pada sebagian siswa, keterbatasan sumber belajar, serta minimnya

sarana dan prasarana pendukung. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek, terutama dalam keterbatasan waktu pelaksanaan.

Sementara itu, pada aspek penilaian pembelajaran, guru relatif mampu melaksanakan asesmen formatif dan sumatif. Namun, tantangan utama terletak pada penentuan bentuk asesmen yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik, khususnya dalam pembelajaran berbasis proyek. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, guru melakukan kolaborasi antar guru, mengikuti pelatihan, meningkatkan literasi TIK, serta menyusun perangkat pembelajaran yang lebih adaptif. Sekolah juga berperan aktif melalui pendampingan, pengawasan, dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Sinergi antara guru dan sekolah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Berkamsyah. (2021). Pendidikan berbasis kemerdekaan belajar. Jakarta: Prenadamedia Group.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). Standar kompetensi guru pendidikan agama Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Kurikulum 2004: Standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Depdiknas.

Freire, P. (2008). Pendidikan kaum tertindas. Jakarta: LP3ES.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022a). Panduan pengembangan modul ajar Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kemdikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Kurikulum merdeka. Retrieved from <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Simanjuntak, P. J. (2005). Manajemen dan evaluasi kinerja. Jakarta:

- Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirman. (2012). Pengembangan
keterampilan dasar mengajar.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
- Jurnal :**
- Dela, R., Putra, A., & Sari, M. (2020).
Konsep merdeka belajar dalam
perspektif pendidikan nasional.
Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(2),
90–100.
- Dela, R., Suryani, L., & Prasetyo, A.
(2020). Konsep merdeka belajar
dalam perspektif pendidikan
nasional. Jurnal Pendidikan
Nasional, 5(2), 90–102.
- Fauzan, A., Nurhayati, S., & Lestari,
D. (2021). Pendidikan sebagai
pengalaman belajar sepanjang
hayat. Jurnal Pendidikan dan
Pembelajaran, 28(4), 497–504.
- Hermawan, I., Nurhadi, M., & Putri, A.
(2020). Dinamika perubahan
kurikulum dalam sistem pendidikan
Indonesia. Jurnal Kurikulum dan
Pembelajaran, 4(1), 35–43.
- Purwoko, B. (2020). Merdeka belajar
sebagai otonomi pendidikan. Jurnal
Pendidikan Indonesia, 2(1), 1–10.
- Suprayitno. (2020). Pembelajaran
kokurikuler berbasis proyek dalam
penguatan profil pelajar Pancasila.
Jurnal Pendidikan Karakter, 10(1),
65–75.
- Susilowati, E. (2022). Implementasi
kurikulum merdeka belajar dalam
pembelajaran di sekolah. Jurnal
Pendidikan dan Pembelajaran,
9(2), 252–259.